



**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
PERUBAHAN TAHUN 2020**



**SEMARAPURA**

**2020**



## BUPATI KLUNGKUNG

### **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Suwirta

Jabatan : Bupati Klungkung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Semarapura, 1 November 2020

✓ BUPATI KLUNGKUNG, ✓

✍ I NYOMAN SUWIRTA

## DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja _____	ii
Daftar Isi _____	iii
<b>PENDAHULUAN</b> _____	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah _____	1
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja _____	2
<b>PERJANJIAN KINERJA</b> _____	3
2.1. Perencanaan Kinerja _____	3
2.2. Perjanjian Kinerja _____	7
2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja _____	7
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran _____	7
<b>PENUTUP</b> _____	17

# **PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep *good governance*. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk pemerintah kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan perubahan-perubahan yang terjadi di tahun 2020 pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat terakomodir serta terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

## **1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari :
  - a. Dinas Kesehatan
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - d. Dinas Pendidikan
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  - h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
  - i. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
  - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
  - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
  - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - n. Dinas Perhubungan
  - o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - p. Dinas Pariwisata
  - q. Dinas Pertanian
  - r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5. Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan Banjarangkan
  - b. Kecamatan Klungkung
  - c. Kecamatan Nusa Penida
  - d. Kecamatan Dawan

### **1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung.

# PERJANJIAN KINERJA

## 2.1. Perencanaan Kinerja

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka. Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan

pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali. Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai “PANCA SANTI” yang pelaksanaannya dilandasi semangat GEMA SANTI (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2018–2023, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran
<i>Misi 1 : Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.</i>	
1. Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (intangible)
<i>Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.</i>	
1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
	1.3 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
<i>Misi 3: Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.</i>	
1. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS
	1.2 Meningkatnya Kesetaraan Gender
	1.3 Terpenuhinya Hak Anak
	1.4 Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri
	1.5 Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Berkualitas dan Seimbang
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap tahun	2.1. Meningkatnya investasi daerah
	2.2. Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat
	2.3. Meningkatnya keragaman pola pangan harapan



Tujuan	Sasaran
<i>Misi 4: Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik</i>	
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	1.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	2.1 Meningkatnya kesadaran berdemokrasi
	2.2 Menurunkan potensi konflik
	2.3 Menurunnya tingkat risiko bencana
	2.4 Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
<i>Misi 5: Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</i>	
1. Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.1 Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kerjanya. Adapun Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2020 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi
6	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan

## 2.2. Perjanjian Kinerja

### 2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2020, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2020 adalah sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung  
Perubahan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	24,00
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,34
4	Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	56
6	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik Yang Mantap	Indeks Demokrasi Daerah	77,1
7	Berkurangnya Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	54
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	86

### 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan 134 program dengan total anggaran senilai Rp. 454,982,818,798.00. Adapun program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2020 dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4  
Program dan Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja  
Perubahan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Program Yang Mendukung	Anggaran Perubahan 2020	Keterangan
1	Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah	Cakupan budaya daerah yang dilestarikan (%)	24	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	811,494,458.00	Disbudpora
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,133,034,233.00	Disbudpora
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	2,230,559,353.00	Disbudpora
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31,520,009,459.00	Dinkes dan RSUD
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	958,713,350.00	Dinkes
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	879,233,400.00	Dinkes
				Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	31,520,009,459.00	Dinkes
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	310,604,390.00	Dinkes
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan	29,903,905,002.05	Dinkes
				Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	41,899,278,310.89	Dinkes
				Program Penanggulangan Penyakit Menular	1,342,621,050.00	Dinkes
				Program Pencegahan Penyakit Menular	138,956,000.00	Dinkes
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	13,776,091,067.95	RSUD
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	135.560.377,00	RSUD

				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	108,756,146,197.14	RSUD
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,140,971,755.00	Disdik
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	10,354,625,064.00	Disdik
				Program Pendidikan Non Formal	385,332,500.00	Disdik
				Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28,543,442,393.00	Disdik
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	1,535,531,290.00	Disdik
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	13,644,313,772.00	Disdik
				Program Penyelenggaraan Perpustakaan	74,934,156.00	Disarpus
				Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	2,197,350,234.00	Disbudpora
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	921,379,500.00	DPTK
				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	146.865.000,00	DPTK
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	502,387,000.00	DPTK
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,34	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	743,266,651.12	DSPPPA
				Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	167,869,000.00	DSPPPA
				Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan	607,316,978.00	DSPPPA

				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	108,094,950.00	DSPPPA
				Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	56,231,150.00	DSPPPA
				Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan	2,152,517,454.00	DPMDPPKB
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,195,732,304.00	DPMDPPKB
				Program Keluarga Berencana	1,798,094,304.00	DPMDPPKB
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	445,308,540.00	DPMDPPKB
				Program Transmigrasi Regional	49,983,000.00	DPMDPPKB
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB	6	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	43,775,552.00	DPMPTSP
				Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	26,615,502.00	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	60,519,000.00	DPMPTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	54,402,400.00	DPMPTSP
				Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	181,569,008.00	DPMPTSP
				Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	101,214,074.00	DPMPTSP
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	195,491,140.00	DKUKM
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	197,164,710.00	DKUKM

				Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	624,858,200.00	DKUKM
				Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	7,030,100,454.00	DKUKM
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	57,498,552.00	DKUKM
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	732,954,106.97	DISPAR
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,554,175,266.00	DISPAR
				Program Industri Pariwisata	1,707,743,630.00	DISPAR
				Program Sumber Daya Pariwisata	704,075,600.00	DISPAR
				Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	89,604,142.00	DISTAN
				Program Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman	170,551,552.00	DISTAN
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	274,334,052.00	DISTAN
				Program Peningkatan Produksi Peternakan	736,507,256.00	DISTAN
				Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	12,101,000.00	DISTAN
				Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Pertanian	486,391,436.00	DISTAN
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	64,441,400.00	DKPP
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	203,204,900.00	DKPP
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya	875,543,160.00	DKPP
5	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional,	Indeks Reformasi Birokrasi	56	Program Pengembangan Otonomi Daerah	234,933,552.00	SETDA

Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif			Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2,171,799,904.00	SETDA
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	11,366,920,203.00	SETDA
			Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	98,543,704.00	SETDA
			Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	396,283,006.00	SETDA
			Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah	192,427,114.00	SETDA
			Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	408,992,968.00	SETDA
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	886,067,062.00	SETDA
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	783,951,508.00	SETWAN
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21,905,462,554.00	SETWAN
			Program Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	222,455,772.00	SETWAN
			Program Peningkatan Kinerja DPRD	1,586,131,564.00	SETWAN
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	780,617,000.00	KECAMATAN
			Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	52,094,700.00	KECAMATAN
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	436,817,100.00	KECAMATAN
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Kaja	625,784,586.87	KEC. KLUNGKUNG

				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kangin	653,115,392.00	KEC. KLUNGKUNG
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kauh	639,325,851.71	KEC. KLUNGKUNG
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Tengah	596,814,860.69	KEC. KLUNGKUNG
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod	639,842,192.88	KEC. KLUNGKUNG
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod Kangin	652,848,658.00	KEC. KLUNGKUNG
				Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	720,775,451.82	INSPEKTORAT
				Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	69,928,152.00	INSPEKTORAT
				Program Peningkatan Pelembagaan Pemerintah yang Bersih	92,723,452.00	INSPEKTORAT
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	26,291,504.00	BAPERLITBANG
				Program Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur	228,636,213.00	BAPERLITBANG
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	526,326,400.00	BAPERLITBANG
				Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	580,887,502.00	BPKPD
				Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah	141,421,500.00	BPKPD



				Program Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB	495,985,342.00	BKPKD
				Program Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	669,773,518.00	BKPKD
				Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	337,489,088.00	BKPKD
				Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	330,200,114.00	BKPKD
				Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara	18,019,500.00	BKPSDM
				Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	204,059,000.00	BKPSDM
				Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	799,776,700.00	BKPSDM
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	852,358,759.00	BKPSDM
				Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	733,991,500.00	BAPERLITBANG
				Program Penyelenggaraan Kearsipan	41,469,300.00	DISARPUS
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	210,846,504.00	DLHP
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,696,841,912.00	DISKOMINFO
				Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	252,259,858.00	DISKOMINFO
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1,926,500.00	DISKOMINFO
				Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	54,822,600.00	DISKOMINFO
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	371,922,200.00	DISDUKCAPIL

				Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	700,510,000.00	DISDUKCAPIL
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil	331,085,000.00	DISDUKCAPIL
6	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah	77,1	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	46,029,550.00	KESBANG
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	39,002,350.00	KESBANG
				Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	8,201,000.00	KESBANG
				Program Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	569,075,000.00	KESBANG
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	51,358,200.00	BPBD
				Program Penanggulangan Bencana	99,604,000.00	BPBD
				Program Penanganan Darurat Bencana	708,437,280.00	BPBD
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1,368,021,992.00	SATPOLPP DAMKAR
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	123,016,156.00	SATPOLPP DAMKAR
				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,332,254,348.00	SATPOLPP DAMKAR
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	80,370,004.00	SATPOLPP DAMKAR
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	54	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	0.00	DPMPSTP
				Program Pengembangan Keciaptakarya	11,583,701,202.00	PUPRKP
				Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	13,129,512,885.00	PUPRKP

				Program Penataan Ruang	366,531,550.00	PUPRKP
				Program Pengembangan Bina Konstruksi	143,787,500.00	PUPRKP
				Program Pengembangan Sumber Daya Air	7,123,694,988.00	PUPRKP
				Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,828,283,150.00	PUPRKP
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	584,013,370.00	PUPRKP
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2,125,838,162.00	DISHUB
				Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	9,912,367,179.00	DISHUB
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4,726,361,550.00	DISHUB
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	110,901,432.00	DISHUB
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	86	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9,589,712,035.00	DLHP
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	93,379,008.00	DLHP
				Program Penanganan dan Peningkatan	6,309,862,794.00	DLHP

				Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH		
				Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	154,250,223.58	DLHP

## PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung Perubahan tahun 2020. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD Kabupaten Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance* dan *clean government*, khususnya melalui peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA